



Ketika Kekuasaan Di Uji: Nepotisme, Fitnah, dan Perang Saudara di Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib

INFO PENULIS

Nazwa Ramadhani Fitrie
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
231340177.nazwa@uinbanten.ac.id

Achmad Maftuh Sujana
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
maftuhsujana@gmail.com

Dea Upera Amzaeni
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
231340181.dea@uinbanten.ac.id

Nailah Dhafiyah Widyatmaka
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
231340153.nailah@uinbanten.ac.id

Septiyani
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
231340166.septi@uinbanten.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fitrie, N. R., Sujana, A. M., Amzaeni, D. U., Widyatmaka, N.D., & Septiyani. (2025) Ketika Kekuasaan Di Uji: Nepotisme, Fitnah, dan Perang Saudara di Zaman Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4379-4384.

Abstrak

Penulisan Artikel ini membahas dinamika kekuasaan dan krisis politik pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan kedua khalifah tersebut menjadi periode yang sangat menentukan dalam sejarah Islam, karena diwarnai oleh tuduhan nepotisme, fitnah politik, serta perang saudara yang menguji keutuhan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penyebab munculnya konflik internal umat Islam, sekaligus menganalisis nilai-nilai moral dan kepemimpinan yang tercermin dalam tindakan para khalifah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-historis, penelitian ini menelusuri data dari berbagai sumber pustaka, seperti jurnal, artikel akademik, dan literatur sejarah Islam klasik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tuduhan nepotisme terhadap Utsman bin Affan lebih bersifat politis daripada faktual, sementara kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menampilkan keteguhan moral dan prinsip keadilan di tengah tekanan politik dan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam sejatinya merupakan ujian moral dan spiritual bagi pemimpin, yang hanya dapat dijalankan dengan integritas dan keadilan.

Kata Kunci: Utsman bin Affan; Ali bin Abi Thalib; Nepotisme; Fitnah; Perang Saudara; Kepemimpinan Islam

Abstract

This article examines the dynamics of power and political crises during the reign of Caliphs Uthman ibn Affan and Ali ibn Abi Talib. Their leadership marked a crucial period in Islamic history, characterized by accusations of nepotism, political slander, and civil wars that tested the unity of the Muslim community. This study aims to explore the causes of internal conflicts within the early Islamic society and to analyze the moral and leadership values reflected in the actions of both caliphs. Using a qualitative descriptive-historical method, this research draws data from various literature sources, including academic journals and historical texts. The findings indicate that the accusations of nepotism against Uthman ibn Affan were more political than factual, while the leadership of Ali ibn Abi Talib demonstrated moral steadfastness and justice amid social and political turmoil. The study concludes that power in Islam serves as a moral and spiritual test for leaders, emphasizing that integrity and justice are fundamental to preserving unity and stability in governance.

Key Words: Ali ibn Abi Talib; Nepotism; Slander; Civil War; Islamic Leadership.

A. Pendahuluan

Periode kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu bab paling kompleks dan sarat makna dalam sejarah peradaban Islam. Setelah masa kepemimpinan Umar bin Khattab, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan ketegasan hukum, tongkat estafet kekuasaan berpindah kepada Utsman bin Affan. Sosok ini dikenal sebagai khalifah yang lembut, dermawan, dan berjasa besar dalam pembukuan mushaf Al-Qur'an. Namun, di tengah stabilitas awal pemerintahannya, muncul benih-benih ketegangan sosial dan politik yang akhirnya berkembang menjadi fitnah besar yang mengguncang kesatuan umat Islam. Menurut (Murtiningsih, 2018), tuduhan nepotisme terhadap Utsman bin Affan bermula dari kebijakan politiknya yang mengangkat beberapa kerabatnya dari Bani Umayyah untuk menduduki posisi strategis, seperti Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam dan Marwan bin Hakam di Madinah. Kebijakan ini sebenarnya merupakan bentuk kepercayaan terhadap kemampuan administratif dan loyalitas mereka, mengingat luasnya wilayah kekuasaan Islam saat itu. Namun, keputusan tersebut memunculkan kecemburuan dan kecurigaan di kalangan sebagian sahabat dan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan posisi serupa.

Menurut (Rohmatillah et al., 2023), Situasi semakin rumit ketika muncul pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menebar fitnah dan provokasi. Salah satu tokoh yang paling dikenal dalam konteks ini adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan menebarkan ide-ide subversif di kalangan umat. Ia menuduh Utsman telah melakukan penyelewengan terhadap ajaran Rasulullah dan menuntut agar kekuasaan dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib. Fitnah yang disebarkan secara sistematis ini memicu gelombang pemberontakan di berbagai wilayah, hingga akhirnya Utsman dibunuh secara tragis di kediamannya sendiri. Pasca wafatnya Utsman, umat Islam memasuki masa yang penuh gejolak di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali diangkat sebagai khalifah keempat dalam situasi politik yang sangat tidak stabil. Sebagian umat menuntut agar Ali segera menindak para pembunuh Utsman, sementara sebagian lainnya mendesak agar prioritas utama adalah memulihkan keamanan dan stabilitas negara. Ketegangan ini memuncak dalam dua perang besar, yaitu Perang Jamal dan Perang Shiffin, yang menjadi simbol perpecahan politik dalam sejarah Islam.

Mulyani menegaskan bahwa konflik pada masa Ali tidak hanya merupakan pertikaian politik, tetapi juga krisis moral dan spiritual. Ali menolak jalan kekerasan dan tetap berpegang pada prinsip keadilan serta nilai-nilai Islam, meskipun hal itu membuat posisinya semakin sulit di mata lawan politik. Dari peristiwa ini, terlihat bahwa kekuasaan dalam Islam bukan sekadar persoalan politik, melainkan ujian besar bagi moralitas dan keimanan seorang pemimpin. Kajian terhadap periode ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan dan fitnah dapat menguji keutuhan suatu umat. Melalui pendekatan historis, penelitian ini berupaya menelusuri faktor-faktor penyebab utama perpecahan di masa Utsman dan Ali, serta menggali nilai-nilai kepemimpinan Islam yang relevan dengan konteks sosial modern.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-historis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial dan historis secara mendalam melalui interpretasi terhadap sumber-sumber tertulis. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelaah makna di balik peristiwa sejarah, sedangkan metode deskriptif-historis digunakan untuk menggambarkan kejadian masa lalu secara sistematis, kronologis, dan faktual. Menurut (Sefrianti et al., 2024), pendekatan historis dalam studi Islam tidak hanya berfungsi untuk mencatat kejadian, tetapi juga untuk memahami konteks sosial, politik, dan moral yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar mengulang fakta sejarah, tetapi berusaha menginterpretasikan nilai-nilai yang terkandung di balik peristiwa fitnah dan konflik kekuasaan pada masa Utsman dan Ali.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian dari berbagai literatur menunjukkan bahwa dinamika politik pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan administratif, kondisi sosial-ekonomi, serta berkembangnya propaganda politik. (Rohmatillah et al., 2023) memperlihatkan bahwa tuduhan nepotisme terhadap Utsman sering kali berangkat dari pengangkatan beberapa kerabatnya di posisi strategis, namun sebagian besar sumber akademik menyatakan bahwa pengangkatan tersebut tidak semata-mata berdasarkan hubungan keluarga, melainkan karena faktor kompetensi dan kebutuhan stabilitas pemerintahan. Temuan lain menunjukkan bahwa fitnah dan disinformasi memegang peranan penting dalam meningkatnya ketegangan politik.

Penyebaran isu oleh tokoh-tokoh provokatif seperti Abdullah bin Saba' mempercepat terbentuknya opini publik negatif terhadap Utsman. Fitnah tersebut menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain, menjadikan konflik ini bersifat nasional dan bukan hanya perbedaan internal di Madinah. Selain itu, hasil kajian memperlihatkan bahwa pembunuhan Utsman merupakan titik balik utama yang memicu serangkaian konflik politik berikutnya. Pada masa Ali bin Abi Thalib, ketegangan semakin meningkat hingga melahirkan Perang Jamal dan Perang Shiffin, yang menjadi simbol perpecahan politik besar-besaran dalam tubuh umat Islam. Dua perang besar ini memperjelas bahwa fitnah sebelumnya telah menciptakan polarisasi tajam yang sulit dipulihkan meskipun kepemimpinan telah berganti. Secara keseluruhan, temuan literatur menegaskan bahwa konflik pada masa kedua khalifah tersebut bukan hanya lahir dari kebijakan individu, tetapi merupakan respons kolektif masyarakat terhadap perubahan sosial, distribusi kekuasaan, dan manipulasi politik yang semakin sulit dikendalikan.

Pembahasan

A. Kebijakan Utsman dan Isu Nepotisme

(Aziz Faturokhman, 2016) mengatakan kontroversi mengenai kebijakan Utsman bin Affan lebih kompleks daripada sekadar isu pengangkatan kerabat. Dalam konteks politik awal Islam, pemilihan pejabat bukan hanya persoalan hubungan keluarga, tetapi juga terkait kepercayaan, pengalaman perang, pengetahuan administratif, dan kemampuan mengelola daerah yang sedang berkembang pesat. Pada masa Utsman, kekhalifahan membentang dari Afrika Utara hingga Persia, sehingga menuntut struktur birokrasi yang lebih kokoh. Banyak kerabat Utsman yang ditunjuk telah lama berperan dalam pemerintahan dan terbukti kompeten di bawah kepemimpinan sebelumnya, khususnya di era Umar.

Namun, perubahan gaya kepemimpinan Utsman yang lebih lunak dan diplomatis membuat sebagian masyarakat merasa pejabat-pejabat itu tidak lagi diawasi secara ketat. Utsman lebih mengedepankan pendekatan persuasif, berbeda dengan Umar yang terkenal sangat tegas dan intens dalam memantau pejabatnya. Pergeseran gaya ini menyebabkan sebagian masyarakat menilai bahwa Utsman terlalu memberi "kelonggaran," terutama kepada pejabat-pejabat dari keluarga sendiri. Dalam kondisi sosial yang sensitif, persepsi seperti ini sangat mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkuat narasi tentang nepotisme.

Lebih jauh lagi, masyarakat saat itu sedang mengalami transisi sosial dari komunitas sederhana di Madinah menuju struktur masyarakat multikultural di wilayah-wilayah taklukan baru. Ketidaksiapan menghadapi perubahan ini membuat mereka rentan terhadap prasangka politik. Kritik terhadap pengangkatan kerabat sebenarnya bukan sepenuhnya karena mereka tidak kompeten, tetapi karena sebagian kelompok merasa tidak memperoleh akses kekuasaan yang sama. Maka konflik yang tampak sebagai nepotisme sejatinya merupakan persilangan

antara kecemburuan sosial, perubahan struktur politik, dan propaganda yang terus berkembang.

B. Fitnah Politik dan Ketegangan Sosial

Menurut (Hidayat et al., 2025), Fitnah pada masa Utsman tidak muncul begitu saja; ia bertumbuh dari serangkaian faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berhubungan. Ekspansi wilayah Islam menghasilkan pemasukan ekonomi yang sangat besar dari rampasan perang dan pajak daerah taklukan. Peningkatan ekonomi yang drastis ini tidak selalu diiringi dengan pemerataan distribusi yang merata di semua wilayah. Kelompok-kelompok tertentu merasa tidak mendapatkan bagian yang sesuai, sehingga muncul rasa ketidakpuasan yang mudah diarahkan ke isu politik. Dalam kondisi seperti ini, muncul tokoh atau kelompok provokator yang sengaja memperkeruh keadaan. Abdullah bin Saba' sering disebut sebagai salah satu sosok yang menaburkan ide-ide subversif, mulai dari klaim bahwa Utsman tidak lagi mengikuti sunnah Nabi hingga menyebarkan narasi bahwa kekhalifahan seharusnya kembali kepada keluarga Ali (Nurry Marfu'ah, Afrizal, 2024). Meskipun sebagian sejarawan memperdebatkan keberadaan tokoh ini, yang jelas adalah bahwa fitnah memang beredar secara luas dan terorganisir.

Fitnah paling efektif pada masa itu karena penyampaian informasi masih sangat bergantung pada sistem lisan. Tidak adanya media resmi membuat kabar berkembang tanpa kontrol. Sebuah rumor yang disampaikan di satu kota dengan cepat berubah menjadi tuduhan serius di kota lain. Keresahan lokal di Mesir, Kufah, dan Basrah kemudian saling terhubung melalui jaringan komunikasi informal, menghasilkan gelombang ketidakpuasan yang menyasar pemerintah pusat. Selain itu, masyarakat baru dari wilayah-wilayah taklukan tidak memiliki hubungan emosional yang kuat dengan struktur kepemimpinan Madinah. Mereka lebih mudah terprovokasi oleh kabar-kabar negatif tentang pemerintah pusat, terutama ketika kabar tersebut menyentuh isu keadilan, pembagian ekonomi, dan legitimasi politik. Dalam situasi seperti ini, fitnah menjadi alat yang sangat kuat untuk menciptakan persepsi bahwa Utsman tidak lagi layak memimpin, meskipun tuduhan tersebut tidak selalu memiliki bukti.

C. Krisis Politik dan Pembunuhan Utsman

Pembunuhan Utsman merupakan salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Islam awal, dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa itu merupakan hasil akumulasi dari ketegangan politik yang terus meningkat, prasangka sosial yang tidak terselesaikan, dan kurangnya mekanisme komunikasi yang dapat meredam gejolak masyarakat. Para pemberontak datang dari berbagai wilayah dengan membawa bermacam-macam tuntutan: ada yang menuduh Utsman melanggar hukum, ada yang menuntut reformasi kebijakan provinsi, ada pula yang hanya ikut-ikutan karena termakan propaganda (Maimun, 2023) Salah satu ironi terbesar dalam peristiwa ini adalah bahwa Utsman sebenarnya tetap menjalankan pemerintahan secara adil. Ia menghukum kerabatnya yang bersalah, mengoreksi keputusan pejabat yang melenceng, dan berupaya menjaga persatuan umat.

Namun ketika masyarakat telah dipengaruhi oleh fitnah, tindakan benar pun dianggap salah. Ketika pemberontak mengepung rumahnya, Utsman menolak melibatkan kekuatan militer karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah antar sesama Muslim. Ia memilih mempertahankan prinsip moral meskipun hal itu mengancam keselamatannya sendiri. Ketidakmampuan pemerintah pusat membendung arus fitnah, lemahnya komunikasi politik, dan kondisi masyarakat yang sudah terbakar emosi menjadi faktor besar yang mendorong terjadinya pembunuhan. Peristiwa ini bukan sekadar konflik politik, tetapi juga trauma kolektif yang sangat dalam bagi umat Islam, karena untuk pertama kalinya seorang khalifah dibunuh oleh kaum Muslim sendiri. Peristiwa ini kemudian menjadi sumber perpecahan yang terus berlanjut hingga generasi berikutnya.

D. Perang Saudara pada Masa Ali (Jamal dan Shiffin)

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dimulai dalam kondisi negara yang terbelah dan penuh ketegangan. Ali sebenarnya tidak berada dalam posisi yang bebas menentukan kebijakan; ia harus menghadapi tekanan dari berbagai kelompok yang menuntut penyelesaian cepat atas pembunuhan Utsman. Di satu sisi, sebagian kelompok menuntut qishash segera sebagai bentuk keadilan. Di sisi lain, Ali memahami bahwa negara sedang kacau dan penegakan hukum yang tergesa-gesa justru berpotensi menciptakan perang saudara yang lebih luas. Perbedaan pandangan ini kemudian memunculkan Perang Jamal. Pertempuran ini sangat menguras emosi umat Islam karena melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Aisyah, Thalbah, dan Zubair (Reni

Karlina, Afrizal, 2024). Menurut (Hasibuan et al., 2024), Perang ini bukan sekadar konflik politik, tetapi pertemuan antara dua kelompok yang sama-sama meyakini bahwa mereka sedang memperjuangkan keadilan. Ali memandang bahwa stabilitas negara harus didahulukan, sementara kelompok Jamal berpendapat bahwa penundaan penegakan hukum justru akan memperburuk keadaan.

Tidak lama setelah itu, Perang Shiffin terjadi melibatkan Ali dan Muawiyah. Muawiyah menolak berbaiat sebelum pembunuh Utsman dihukum, dan menilai bahwa Ali kurang tegas dalam menindak para pemberontak. Ketika perang tidak menghasilkan kemenangan yang jelas, diputuskan dilakukan tahkim (arbitrase). Sayangnya, proses tahkim dimanfaatkan sebagai strategi politik, sehingga tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan. Kecewa dengan keputusan tahkim, sebagian pasukan Ali keluar dari barisannya dan membentuk kelompok Khawarij. Mereka memandang bahwa tahkim adalah pengkhianatan terhadap hukum Allah. Kehadiran kelompok ini semakin memperumit situasi politik karena mereka tidak hanya melawan Ali, tetapi juga menolak Muawiyah. Dari sinilah terlihat bahwa perang saudara pada masa Ali tidak hanya dipicu oleh masalah politik, tetapi juga oleh perbedaan pandangan keagamaan, interpretasi hukum, dan persaingan kekuasaan yang semakin kompleks. Konflik ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah umat Islam dan menjadi akar munculnya berbagai aliran pemikiran dan kelompok politik di kemudian hari

D. Kesimpulan

Konflik pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa dinamika politik awal Islam tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang cepat, berkembangnya opini publik yang dipengaruhi fitnah, serta ketegangan antar kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Tuduhan nepotisme terhadap Utsman pada dasarnya lebih dipicu oleh persepsi masyarakat dan propaganda politik, bukan bukti nyata penyalahgunaan kekuasaan. Banyak pejabat yang ditunjuk Utsman sebenarnya memiliki kompetensi dan pengalaman, namun perubahan gaya kepemimpinan membuat kebijakannya mudah disalahartikan. Fitnah yang tersebar di berbagai wilayah memperbesar rasa ketidakpuasan dan mempercepat terjadinya delegitimasi pemerintah. Ketimpangan distribusi ekonomi, kecemburuan sosial, dan lemahnya komunikasi membuat masyarakat mudah terprovokasi. Akumulasi dari faktor-faktor ini berujung pada pembunuhan Utsman, yang kemudian menjadi pemicu utama terjadinya perpecahan besar di kalangan umat. Kepemimpinan Ali berlangsung di tengah kondisi yang tidak stabil. Perbedaan pandangan tentang penegakan hukum atas pembunuh Utsman melahirkan Perang Jamal dan Perang Shiffin.

Konflik ini tidak hanya berdampak politik, tetapi juga melahirkan kelompok-kelompok baru seperti Khawarij, yang memperdalam fragmentasi umat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketidaksepakatan dalam memahami keadilan dan cara menyelesaikan konflik dapat berujung pada perpecahan yang panjang. Secara keseluruhan, periode ini memberikan pelajaran bahwa kekuasaan dalam Islam adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan keadilan, komunikasi yang kuat, dan kesadaran terhadap dinamika sosial. Fitnah dan prasangka terbukti mampu merusak tatanan masyarakat, sehingga menjaga persatuan dan kebenaran informasi menjadi kunci utama untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.

E. Referensi

- Aziz Faturokhman, I. N. (2016). Kontroversi Isu Nepotisme Khalifah Ustman Bin Affan. *Hikmah: Journal Of Islamic Studies*, 18(1), 1–23.
- Hasibuan, N. H., Afrizal, & Sawaluddin. (2024). Ali Bin Abi Thalib: Kekhalifahan Di Tengah Tigapemberontakan Besar. *Urnal Sains Student Research*, 2(6), 514–525.
- Hidayat, R., Rasyid, D., Ramdani, R., Basari, R., & Estuningtyas, R. D. (2025). Peristiwa Fitnah Kubro: Sejarah Dakwah Yang Harus Diluruskan. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 5(1), 8–16. <https://doi.org/10.53888/Alidaroh.V5i1.826>
- Maimun, A. (2023). Pembunuhan Khalifah Utsman Bin Affan Sebagai Anarkisme Politik. *Tafhim Al-Ilmi*, 15(01), 69–86. <https://doi.org/10.37459/Tafhim.V15i01.7079>
- Murtiningsih, M. (2018). Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman Bin Affan Dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 19(1), 159–176. <https://doi.org/10.19109/Jia.V19i1.2385>

- Nurry Marfu'ah, Afrizal, S. (2024). Masa Khalifah Utsman Bin Affan Dalam Nepotisme Dan Pemberontakan. *Nashr Al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam*, 06(3), 191-199. <https://journalpedia.com/1/index.php/jkli>
- Reni Karlina, Afrizal, S. (2024). Ali Ibn Abi Thalib: Pemberontakan Thalhah, Zubair, Dan Aisyah (Perang Jamal). *Nashr Al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam*, 06(3), 191-199. <https://journalpedia.com/1/index.php/jkli>
- Rohmatillah, I., Setiawan, A. M., & Rifai, I. A. (2023). Politik Dan Konflik Pada Masa Pemerintahan Khalifah Usman Bin Affan Abstrak. *Jurnal El Tarikh*, 04, Hal 29-36.
- Sefrianti, R., Afrizal, & Sawaluddin. (2024). Utsman Bin Affan: Nepotisme Dan Pemberontakan Utsman Bin Affan: Nepotism And Rebellion. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 2(4), 1581-1591.